

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
10. Menteri Pendidikan Nasional;
11. Menteri Luar Negeri;
12. Menteri Dalam Negeri;
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Menteri Pekerjaan Umum;
15. Menteri Kehutanan;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Menteri Perhubungan;
19. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
20. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
21. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
22. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
23. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
24. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
25. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
27. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
28. Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA :

Mendukung kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan

strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

**KEDUA :**

Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA, mengutamakan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

1. periklanan;
2. arsitektur;
3. pasar seni dan barang antik;
4. kerajinan;
5. desain;
6. fashion (mode);
7. film, video, dan fotografi;
8. permainan interaktif;
9. musik;
10. seni pertunjukan;
11. penerbitan dan percetakan;
12. layanan komputer dan piranti lunak;
13. radio dan televisi; dan
14. riset dan pengembangan.

**KETIGA :**

Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA:

1. masing-masing Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi pengembangan Ekonomi Kreatif;  
dan
2. bersama-sama menyukseskan program Tahun Indonesia Kreatif 2009.

**KEEMPAT :**

1. Dalam rangka melaksanakan DIKTUM KETIGA membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bertugas melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015 dan pelaksanaan program Tahun Indonesia Kreatif 2009, dengan susunan keanggotaan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Wakil Ketua, Menteri Perdagangan sebagai Pelaksana Harian I dan Menteri Perindustrian sebagai Pelaksana Harian II, serta beranggotakan pejabat Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, instansi terkait lainnya, dan para pakar, sesuai kebutuhan, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
2. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
3. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

KELIMA :  
Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta Presiden.

KEENAM :  
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Presiden ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara instansi terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

KETUJUH :  
Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2009

SASARAN, ARAH, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2009 - 2015

SASARAN	ARAH	STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB
I. Insan kreatif dengan pola pikir dan moodset kreatif	A. Peningkatan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan dan tersebar merata diwilayah Indonesia	1. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk mendukung penciptaan insan kreatif Indonesia	Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator) Menteri Keuangan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Melakukan kajian dan revisi kurikulum pendidikan dan pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin</p> | <p>Nasional<br/>Menteri Pendidikan Nasional<br/>(Koordinator)<br/>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br/>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br/>Menteri Perindustrian<br/>Menteri Perdagangan<br/>Menteri Pertanian<br/>Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p> |
| <p>3. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin</p>                                     | <p>Menteri Pendidikan Nasional<br/>(Koordinator)<br/>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br/>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br/>Menteri Perindustrian<br/>Menteri Perdagangan<br/>Menteri Pertanian<br/>Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</p>              |
| <p>4. Menciptakan akses pertukaran informasi dan pengetahuan</p>   | <p>Menteri Komunikasi dan Informatika<br/>(Koordinator)<br/>Menteri</p>  |

ekonomi kreatif  
di masyarakat

Pendidikan  
Nasional  
Menteri Tenaga  
Kerja dan  
Transmigrasi  
Menteri  
Kebudayaan dan  
Pariwisata  
Menteri  
Perindustrian  
Menteri  
Perdagangan  
Menteri  
Pertanian  
Menteri Negara  
Koperasi dan  
Usaha Kecil dan  
Menengah

B. Peningkatan  
jumlah dan  
perbaikan  
kualitas  
lembaga  
pendidikan dan  
pelatihan formal  
dan informal  
yang mendukung  
penciptaan insan  
kreatif dalam  
Pengembangan  
Ekonomi Kreatif

1. Membangun  
lembaga  
pendidikan dan  
pelatihan formal  
dan informal yg  
terkait dengan  
Pengembangan  
Ekonomi Kreatif,  
di daerah yang  
berpotensi untuk  
dikembangkan  
sebagai klaster  
industri di  
bidang ekonomi  
kreatif

Menteri  
Pendidikan  
Nasional  
(Koordinator)  
Menteri Tenaga  
Kerja dan  
Transmigrasi  
Menteri  
Perindustrian  
Menteri  
Pertanian  
Menteri  
Kebudayaan dan  
Pariwisata  
Gubernur,  
Bupati/  
Walikota  
Menteri

2. Memperbaiki  
Infrastruktur  
dan kualitas  
pembelajaran  
di lembaga  
pendidikan dan  
pelatihan

Pendidikan  
Nasional  
(Koordinator)  
Menteri Tenaga  
Kerja dan  
Transmigrasi  
Menteri  
Perindustrian  
Menteri  
Pertanian

- |  |  |
|--|--|
| <p>3. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk mengembangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif</p> | <p>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br/>Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator)<br/>Menteri Perindustrian<br/>Menteri Pertanian<br/>Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara</p> |
| <p>4. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait kebutuhan SDM dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berkualitas dengan biaya terjangkau</p>           | <p>Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator)<br/>Menteri Keuangan</p>  |
| <p>5. Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif</p>  | <p>Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator)<br/>Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br/>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br/>Menteri Perindustrian</p>                         |

	yang membutuhkan	Menteri Pertanian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Pendidikan Nasional
	6. Menciptakan dan menjaga sistem standarisasi mutu pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif	
C. Peningkatan penghargaan kepada insan kreatif oleh Pemerintah	1. Memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang mendapat kesempatan di dunia Internasional	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Luar Negeri Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Keuangan Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian
	2. Memberikan dukungan pada kegiatan dan organisasi seni budaya dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perindustrian Menteri Pertanian

3. Menyelenggarakan acara dan program yang menggali, mengangkat, dan mempromosikan insan kreatif Indonesia

Menteri Negara Riset dan Teknologi  
Kepala Bagian Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Gubernur, Bupati/Walikota  
Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Perindustrian  
Menteri Dalam Negeri  
Menteri Pertanian  
Menteri Pekerjaan Umum  
Menteri Negara Riset dan Teknologi  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
Kepala Bagian Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Gubernur, Bupati/Walikota  
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Koordinator)

4. Menciptakan profil profesi dan standar kompetensi bagi

	para pelaku dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perindustrian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Bagian Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	5. Memberikan apresiasi/ penghargaan kepada insan kreatif secara berkesinambungan	Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Bagian Pengkajian dan Penerapan Teknologi Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Pendidikan Nasional Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri
D. Peningkatan jumlah wirausahawan kreatif sebagai lokomotif industri di bidang ekonomi kreatif	1. Mendukung para wirausahawan kreatif yang membutuhkan kemudahan dalam memulai dan menjalankan usaha	(Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri

		Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gubernur Bupati/Walikota
	2. Mendorong para wirausahawan sukses untuk berbagi pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif	Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perdagangan
	3. Membangun mekanisme kemitraan antar pelaku bisnis ekonomi kreatif sebagai wadah pelatihan kewirausahaan	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
E. Penciptaan database dan jejaring insan kreatif di dalam	1. Membangun database dan cerita sukses insan kreatif	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri

maupun di luar negeri

dan produk kreatif Indonesia

Perindustrian

Menteri Pendidikan Nasional  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Dalam Negeri  
Menteri Luar Negeri  
Menteri Pertanian

2. Memfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri

Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Luar Negeri  
Menteri Perindustrian  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Pertanian  
Menteri Pendidikan Nasional

3. Mendorong dan memfasilitasi insan kreatif luar negeri ke Indonesia untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan serta membangun jejaring bisnis di bidang ekonomi kreatif

Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Perindustrian  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Tenaga

			Kerja dan Transmigrasi Menteri Pendidikan Nasional Menteri Luar Negeri Menteri Pertanian Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian
		4. Membangun mekanisme kemitraan antar insan kreatif berpengalaman dengan insan kreatif potensial	
II. Industri yang unggul di pasar dalam dan luar negeri, dengan peran dominan wirausahawan lokal	A. Peningkatan daya tarik industri di bidang ekonomi kreatif	1. Memperluas jangkauan distribusi produk kreatif di dalam dan luar negeri	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Menteri Luar Negeri Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Dalam Negeri Menteri Pertanian Menteri Luar Negeri
		2. Meningkatkan apresiasi pasar terhadap produk kreatif di dalam dan luar negeri	

- |  |  |
|--|--|
| 3. Melakukan riset pemasaran produk kreatif di dalam dan luar negeri         | Menteri Perdagangan (Koordinator)<br>Menteri Perindustrian<br>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br>Menteri Pertanian<br>Menteri Luar Negeri<br>Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  |
| 4. Melakukan promosi produk kreatif di dalam dan luar negeri                 | Menteri Perdagangan (Koordinator)<br>Menteri Perindustrian<br>Menteri Kebudayaan dan Pariwisata<br>Menteri Luar Negeri<br>Menteri Dalam Negeri<br>Menteri Pertanian<br>Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah<br>Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal<br>Kepala Badan Standarisasi Nasional |
| 5. Menata dan merevitalisasi regulasi distribusi, regulasi impor-ekspor, dan | Menteri Perdagangan (Koordinator)<br>Menteri Dalam Negeri<br>Menteri   |

	subsidy untuk menjamin nilai tambah yang dapat dinikmati dengan adil	Keuangan Menteri Pertanian
	6. Mendorong penegakan hukum atas penyelundupan, impor illegal, pembajakan serta pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual(HKI)	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator) Menteri Perdagangan Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Keuangan Menteri Pertanian
	7. Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil untuk menjamin setiap pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif memiliki akses pasar yang sama	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Pertanian Gubernur, Bupati/Walikota
B. Peningkatan efisiensi serta produktivitas industri untuk meningkatkan keunggulan komparatif	1. Melakukan penataan industri pendukung terhadap industri di bidang ekonomi kreatif	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Perdagangan Menteri Kehutanan Menteri Pertanian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- |   |  |
|---|--|
|   | Menteri<br>Kelautan dan<br>Perikanan<br>Menteri<br>Pendidikan<br>Nasional<br>Menteri<br>Pekerjaan Umum<br>(Koordinator)<br>Menteri<br>Perhubungan<br>Menteri<br>Komunikasi dan<br>Informatika<br>Menteri<br>Perdagangan<br>Menteri<br>Pertanian<br>Menteri Negara<br>Badan Usaha<br>Milik Negara |
| 2. Mengembangkan infrastruktur transportasi dan infrastruktur telekomunikasi untuk memperluas jangkauan produk kreatif      | Menteri<br>Keuangan<br>(Koordinator)<br>Menteri<br>Perdagangan<br>Menteri<br>Pertanian   |
| 3. Memberikan insentif ekspor produk kreatif  | Menteri<br>Keuangan<br>(Koordinator)<br>Menteri<br>Perdagangan<br>Menteri<br>Pertanian   |
| 4. Memberikan insentif untuk impor bahan baku produk kreatif  | Menteri<br>Keuangan<br>(Koordinator)<br>Menteri<br>Perdagangan<br>Menteri<br>Pertanian   |
| 5. Melakukan penataan sebaran Perindustrian industri yang mendukung penciptaan klaster industri dan koridor ekonomi kreatif | Menteri<br>Keuangan<br>(Koordinator)<br>Menteri<br>Perdagangan<br>Menteri<br>Pertanian<br>Menteri Negara<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil dan<br>Menengah  |

C. Peningkatan inovasi bermuatan lokal, untuk menciptakan keunggulan kompetitif

1. Mengembangkan sentra desain produk kreatif

2. Meningkatkan riset sosial-ekonomi, sejarah budaya, dan seni

3. Melakukan sosialisasi tentang pasar, desain, hasil penelitian dan perkembangan teknologi yang terkait dengan pengembangan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Menteri Perindustrian (Koordinator)  
Menteri Perdagangan  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Pertanian  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Koordinator)  
Menteri Pendidikan Nasional  
Menteri Pertanian  
Menteri Negara Riset dan Teknologi  
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Perindustrian  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri

		industri di bidang ekonomi kreatif	Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
III. Teknologi yang mendukung penciptaan kreasi dan terjangkau oleh masyarakat Indonesia	A. Pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri di bidang ekonomi kreatif menuju klaster teknologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat prioritas basis pendukung teknologi informasi dan komunikasi bagi industri di bidang ekonomi kreatif</li> <li>2. Memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar industri, lembaga riset pemerintah, dan pendidikan tinggi secara intensif</li> <li>3. Mengoptimalkan lembaga riset pemerintah untuk mengembangkan teknologi yang</li> </ol>	<p>Menteri Komunikasi dan Informatika (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional</p> <p>Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator) Menteri Pertanian</p> <p>Menteri Perindustrian Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Menteri Negara Riset dan Teknologi (Koordinator) Menteri Pendidikan</p>

mendukung pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif	Nasional Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
4. Mengembangkan inkubator-inkubator teknologi untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif	Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator) Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
5. Mengembangkan industri piranti keras dan piranti lunak dalam negeri sebagai penopang teknologi industri di bidang ekonomi kreatif	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Negara Badan Usaha

B. Penguatan kapasitas penguasaan teknologi dan kemampuan pemanfaatan komputer di bidang ekonomi kreatif

1. Meningkatkan jumlah dan mutu lembaga pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di bidang ekonomi kreatif

2. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara yang memiliki teknologi kreatif yang sudah maju

3. Mengembangkan pengelolaan

Milik Negara  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator)  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Negara Riset dan Teknologi  
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Menteri Negara Riset dan Teknologi (Koordinator)  
Menteri Perindustrian  
Menteri Perdagangan  
Menteri Luar Negeri  
Menteri Pendidikan Nasional  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Pertanian  
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  
Menteri Negara Riset dan

sertifikasi atas teknologi di bidang ekonomi kreatif	Teknologi (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pendidikan Nasional Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri Pertanian Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Kepala Badan Standarisasi Nasional
4. Mengintensifkan kerja sama riset dan teknologi multidisiplin antar institusi pendidikan di bidang ekonomi kreatif	Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator) Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Pertanian Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
5. Melaksanakan penetrasi jaringan	Menteri Komunikasi dan Informatika

	infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ke sentra industri di bidang ekonomi kreatif	(Koordinator) Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Keuangan Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Komunikasi dan Informatika (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Koordinator) Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pendidikan Nasional Menteri
C. Penguatan iklim usaha kondusif bagi investasi teknologi pendukung ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revitalisasi regulasi impor teknologi pendukung industri di bidang ekonomi kreatif</li> <li>2. Melakukan sosialisasi regulasi teknologi informasi dan komunikasi yang terkait dengan industri di bidang ekonomi kreatif</li> <li>3. Memberikan insentif investasi teknologi serta infrastruktur teknologi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>	

			Pekerjaan Umum Menteri Riset dan Teknologi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
IV. Pemanfaatan bahan baku dalam negeri secara efektif bagi industri di bidang ekonomi kreatif	A. Peningkatan kemampuan SDM untuk memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam	1. Melakukan intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material tepat guna dan ramah lingkungan	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Pekerjaan Umum Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Negara Lingkungan Hidup Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
		2. Menjalin kemitraan strategis dengan negara yang sudah maju pada teknologi	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Perdagangan Menteri

	pengolahan	Luar Negeri Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Menteri Perindustrian
	3. Melakukan intensifikasi kerja sama lembaga pemerintah/swasta dengan industri di bidang ekonomi kreatif khususnya dalam pemanfaatan bahan baku alternatif	(Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Menteri Perindustrian
B. Peningkatan apresiasi dan promosi sadar lingkungan pada industri di bidang ekonomi kreatif yang menggunakan bahan baku alam	1. Mengkampanyekan penggunaan sumber daya alam (Koordinator) terbarukan dan ramah lingkungan	Menteri Kehutanan Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian

		Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Negara Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
	2. Mengkampanyekan pengembangan produk kreatif yang berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah lingkungan	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Perdagangan Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Kehutanan Menteri Negara Lingkungan Hidup Menteri Negara Riset dan Teknologi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
C. Pembentukan basis-basis teknologi penghasil bahan baku pendukung industri di bidang ekonomi kreatif	1. Mendorong penelitian yang terkait dengan bahan baku sumber daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian

<p>dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara industri, lembaga riset pemerintah, dan pendidikan tinggi</p>	<p>Menteri Negara Riset dan Teknologi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p>
<p>2. Mendukung riset untuk mengembangkan material alternatif yang berciri khas Indonesia sebagai bahan baku industri di bidang ekonomi kreatif</p>	<p>Menteri Negara Riset dan Teknologi (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Menteri Pendidikan Nasional Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia</p>
<p>3. Menentukan prioritas riset keanekaragaman hayati Indonesia yang berpotensi untuk dipatenkan</p>	<p>Menteri Negara Riset dan Teknologi (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Pendidikan Nasional Menteri</p>

		Pertanian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Pertanian Menteri Perindustrian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Keuangan Menteri Kehutanan Menteri Pertanian Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4. Memberikan bantuan dukungan teknologi pengolahan bahan baku industri di bidang ekonomi kreatif	
D. Penciptaan iklim kondusif untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri di bidang ekonomi kreatif	1. Mengevaluasi kebijakan ekspor komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri di bidang ekonomi kreatif  2. Membuat peraturan perdagangan komoditi hayati yang dibutuhkan oleh industri di	

bidang ekonomi kreatif yang adil bagi para pemangku kepentingan

Menteri Perindustrian  
Menteri Keuangan  
Menteri Kehutanan  
Menteri Pertanian

3. Melakukan koordinasi secara aktif untuk mengawasi pemanfaatan sumber daya alam manusia penegakan hukum atas penyelundupan dan pencurian komoditi hayati yang merupakan bahan baku utama bagi industri di bidang ekonomi kreatif

Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Menteri Kehutanan  
Menteri Pertanian  
Menteri Keuangan

V. Masyarakat yang menghargai HKI dan mengkonsumsi produk kreatif lokal

A. Penciptaan penghargaan terhadap HKI dan sosialisasi pentingnya HKI

1. Mengkampanyekan pentingnya kreatifitas dan HKI sebagai modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonomi kreatif

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator)  
Menteri Pertanian  
Menteri Pendidikan Nasional  
Menteri Komunikasi dan Informatika

2. Mendorong pemberantasan praktek pembajakan produk kreatif

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator)  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Perindustrian

		Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator) Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional
	3. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan HKI secara konsisten	Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator) Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Menteri Pertanian Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
	4. Memantapkan landasan integrasi bisnis antara perusahaan dengan insan kreatif berupa kontrak bisnis standar yang menghargai HKI	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional
	5. Memberikan layanan pengabdian masyarakat berupa edukasi dan layanan informasi HKI	Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Koordinator) Menteri Pendidikan Nasional
B. Peningkatan apresiasi terhadap budaya bangsa dan kearifan lokal	1. Mensosialisasikan pentingnya penghargaan atas PARIWISATA keanekaragaman budaya dalam	Menteri Kebudayaan dan (Koordinator) Menteri

masyarakat Indonesia yang merupakan sumber inspirasi bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pendidikan Nasional Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Koordinator)
2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan yang membawa bangsa Indonesia mencintai, menghargai dan bangga sebagai bangsa Indonesia	Menteri Pendidikan Nasional Menteri Pertanian Gubernur, Bupati/Walikota
3. Mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalam negeri sebagai upaya penciptaan pasar bagi produk kreatif di dalam negeri	Menteri Perdagangan (Koordinator) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Perindustrian Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri Pertanian Gubernur, Bupati/Walikota
4. Mendorong penciptaan produk kreatif yang mengintegrasikan budaya lokal dan kecenderungan pasar yang diminati oleh pasar dalam dan luar negeri	Menteri Perindustrian (Koordinator) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Menteri Perdagangan Menteri Komunikasi dan Informatika Menteri

C. Peningkatan kesadaran dan penghargaan dunia internasional terhadap produk kreatif Indonesia

1. Membangun konsep strategi dan implementasi kampanye dan promosi tentang Indonesia

2. Mengembangkan diplomasi budaya sebagai bagian penting dari fungsi perwakilan Republik Indonesia diluar negeri

3. Mempromosikan produk kreatif yang memiliki nilai ekonomis dan membawa ciri khas Indonesia ke dunia Internasional

Pertanian  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Gubernur, Bupati/Walikota  
Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Luar Negeri  
Menteri Perindustrian  
Menteri Pertanian  
Menteri Luar Negeri (Koordinator)  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Perindustrian  
Menteri Perdagangan  
Menteri Pertanian  
Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Perindustrian  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Luar Negeri  
Menteri Negara Koperasi dan

D. Penciptaan masyarakat kreatif yang saling menghargai dan saling bertukar pengetahuan demi kuatnya industri nasional di bidang ekonomi kreatif

1. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya komunitas insan kreatif di dalam dan di luar negeri

2. Mendorong dan Mengikutsertakan ikatan profesi dan asosiasi industri dalam pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif

3. Memberdayakan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas kreatif baik secara formal

Usaha Kecil dan Menengah  
Menteri Perdagangan (Koordinator)  
Menteri Perindustrian  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Dalam Negeri  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Gubernur, Bupati/Walikota  
Menteri Perindustrian (Koordinator)  
Menteri Perdagangan  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Pertanian  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Koordinator)  
Menteri Perindustrian  
Menteri Dalam Negeri

maupun non formal

Menteri Perdagangan  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Pertanian  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Menteri Dalam Negeri (Koordinator)  
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata  
Menteri Pekerjaan Umum  
Menteri Perindustrian  
Menteri Perdagangan  
Menteri Komunikasi dan Informatika  
Menteri Pertanian  
Gubernur, Bupati/Walikota

4. Menciptakan ruang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai dan pertukaran pengetahuan antar pemangku kepentingan industri di bidang ekonomi kreatif

VI. Tercapainya tingkat kepercayaan yang tinggi oleh lembaga pembiayaan terhadap industri di bidang ekonomi kreatif sebagai industri yang menarik

A. Penciptaan skema dan lembaga pembiayaan yang mendukung tumbuh kembangnya industri di bidang ekonomi kreatif

1. Mendorong dan memfasilitasi terciptanya skema pembiayaan yang sesuai bagi industri di bidang ekonomi kreatif

Menteri Keuangan (Koordinator)  
Menteri Perindustrian  
Menteri Perdagangan  
Menteri Pertanian  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Menteri Negara Badan Usaha

	2. Mengembangkan lembaga pembiayaan di sentra-sentra industri di bidang ekonomi kreatif	Milik Negara Menteri Keuangan (Koordinator) Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Gubernur, Bupati/Walikota Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koordinator) Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Gubernur, Bupati/Walikota Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koordinator) Menteri Keuangan
	3. Memberikan prioritas bantuan dan fasilitasi pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak/ mandiri tetapi belum bankable dengan skema pembiayaan yang sesuai	Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Pertanian Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Gubernur, Bupati/Walikota Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koordinator) Menteri Keuangan
B. Penguatan hubungan antara pelaku bisnis, pemerintah, dan cendekiawan dengan lembaga keuangan	1. Memfasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang efektif	Menteri Keuangan Menteri Perindustrian Menteri Perdagangan Menteri Pertanian

2. Memfasilitasi pertemuan antar pelaku industri di bidang ekonomi kreatif yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan

Pendidikan Nasional  
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
Gubernur, Bupati/Walikota  
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Koordinator)  
Menteri Keuangan  
Menteri Perindustrian  
Menteri Perdagangan  
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara  
Gubernur, Bupati/Walikota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO